

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Dalam era globalisasi dan pesatnya perkembangan teknologi, dunia usaha menghadapi tantangan yang semakin kompleks dan dinamis. Perkembangan tersebut juga membuat perusahaan mendapatkan tuntutan yang besar pula termasuk tanggungjawaban perusahaan kepada pemangku kepentingan lain di luar manajemen dan pemilik modal melalui pelaksanaan tanggung jawab ekonomi, sosial, dan lingkungan dalam model paparan keberlanjutan sekaligus sebagai bentuk keikutsertaan dalam mendukung program pembangunan berkelanjutan (Manase et al., 2022). Salah satu standar internasional yang banyak diadopsi adalah Global Reporting Initiative (GRI), yang mendorong perusahaan untuk mengungkapkan kinerja keberlanjutan secara transparan dan akuntabel.

Semakin tingginya tuntutan dari masyarakat dan pemangku kepentingan terhadap praktik bisnis yang etis dan berkelanjutan menjadikan laporan keberlanjutan sebagai salah satu elemen penting dalam komunikasi korporasi. Sekaligus menunjukkan komitmen mereka terhadap prinsip keberlanjutan jangka panjang. Tidak hanya sebagai bentuk pertanggungjawaban, laporan keberlanjutan juga menjadi alat strategis untuk mengidentifikasi risiko dan peluang yang berkaitan dengan aspek keberlanjutan (GRI, 2021).

Walaupun pencapaian keuntungan tetap menjadi tujuan utama perusahaan, keberlanjutan jangka panjang tidak dapat dicapai hanya dengan memenuhi kebutuhan pasar melalui produk dan layanan. Perusahaan juga harus

memperhatikan dampak sosial dan lingkungan dari setiap aktivitas operasionalnya. Dengan mengintegrasikan prinsip keberlanjutan ke dalam strategi bisnis, perusahaan tidak hanya menciptakan nilai ekonomi, tetapi juga memberikan kontribusi positif bagi masyarakat dan lingkungan sekitar (Prahestin, 2023).

Pentingnya pelaporan keberlanjutan tidak hanya terletak pada aspek transparansi dan akuntabilitas, tetapi juga berperan strategis dalam membangun reputasi perusahaan serta meningkatkan kepercayaan para pemangku kepentingan. Di tengah meningkatnya perhatian terhadap isu-isu lingkungan dan sosial, perusahaan yang secara konsisten melaporkan dan memperbaiki kinerja keberlanjutannya akan memiliki daya saing lebih tinggi, terutama di mata investor, konsumen, dan mitra bisnis. Oleh karena itu, penyusunan laporan keberlanjutan yang komprehensif menjadi bagian tak terpisahkan dari strategi perusahaan untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan dan memperkuat posisi mereka di pasar global.

Salah satu upaya yang dapat dilakukan perusahaan untuk memperhatikan dampak sosial tersebut adalah melalui pengungkapan laporan keberlanjutan (*sustainability report*), yang bertujuan untuk menginformasikan kinerja organisasi dalam aspek ekonomi, lingkungan, dan sosial. Menurut Darmawan (2023), laporan keberlanjutan merupakan model pelaporan informasi korporasi kepada para pemangku kepentingan (*stakeholders*) yang mengintegrasikan pelaporan keuangan (*financial reporting*), pelaporan sosial (*social reporting*), pelaporan lingkungan (*environmental reporting*), dan pelaporan tata kelola perusahaan (*corporate governance reporting*) secara terpadu dalam satu paket pelaporan. Laporan ini

menjadi alat yang digunakan oleh organisasi untuk mendukung keberlanjutan. Publik, khususnya investor dan kreditor, dapat menilai secara langsung kinerja perusahaan melalui pengungkapan dalam laporan keberlanjutan.

Pelaporan terintegrasi yang menggabungkan data keuangan dan non-keuangan telah menjadi semakin populer dalam beberapa tahun terakhir. Di Indonesia, laporan keberlanjutan telah muncul sebagai komponen utama dalam kerangka pelaporan terintegrasi ini. Meskipun demikian, laporan keberlanjutan yang bersifat opsional masih sangat jarang ditemukan. Banyak perusahaan yang belum menyadari bahwa penerbitan laporan keberlanjutan merupakan pendekatan penting untuk memperkuat integritas perusahaan dan sangat esensial bagi kelangsungan serta perkembangan perusahaan dalam jangka panjang (Ismi & Hendrani, 2024).

Saat ini perusahaan tidak hanya dituntut untuk mempertahankan profitabilitasnya, tetapi juga untuk mempertahankan bisnisnya secara berkelanjutan, yaitu dengan pembangunan dalam memenuhi kebutuhan dunia sekarang tanpa menolak kemampuan generasi masa mendatang. Perusahaan yang hanya berorientasi pada profit dan mengabaikan perhatiannya pada aspek lingkungan dan sosial, tidak dapat menjamin kelangsungan usahanya di masa depan. Hal ini sudah sering terjadi di Indonesia terkait lemahnya perhatian perusahaan pada aspek sosial dan lingkungan (Qisthi & Fitri, 2021).

Secara umum, pengungkapan laporan keberlanjutan dilakukan secara sukarela oleh perusahaan. Namun, pelaporan ini sering kali diintervensi oleh pihak manajemen sebagai sarana untuk mencapai kepentingan pribadi. Oleh karena itu,

dibutuhkan komponen pengawasan yang independen untuk membantu meningkatkan kualitas dan transparansi pengungkapan laporan keberlanjutan. Salah satu pihak yang berperan penting dalam pengawasan ini adalah komite audit. Komite audit sebagai bagian independen dari struktur tata kelola perusahaan berfungsi untuk memantau praktik pelaporan, baik keuangan maupun non-keuangan, serta meminimalisir ketimpangan informasi antara pemangku kepentingan dan manajemen. Meskipun peran komite audit sering diasosiasikan dengan pengawasan terhadap laporan keuangan, namun saat ini peran tersebut semakin luas seiring dengan meningkatnya tekanan dan ekspektasi dari para pemangku kepentingan terkait tanggung jawab sosial perusahaan (Josua & Septiani, 2020).

Dalam praktiknya, banyak perusahaan berupaya meningkatkan jumlah pelaporan mereka untuk memperkuat citra positif perusahaan dengan menyajikan laporan keberlanjutan yang menarik secara visual. Namun demikian, laporan-laporan tersebut belum tentu mencerminkan substansi atau konten yang akurat. Oleh karena itu, keterbukaan informasi menjadi isu penting yang perlu dievaluasi secara serius oleh praktisi, akademisi, dan regulator. Salah satu tujuan utama keberadaan suatu entitas bisnis adalah untuk mencapai keberlangsungan usaha (*sustainability*) di masa mendatang. Perusahaan yang baik harus mampu mengelola aktivitasnya, baik dari segi keuangan maupun non-keuangan. Bisnis yang hanya berorientasi pada keuntungan tanpa mempertimbangkan dampaknya terhadap lingkungan dan masyarakat sekitar tidak akan mampu mencapai tujuan keberlanjutan tersebut.

Tingkat pengungkapan laporan keberlanjutan perusahaan di Indonesia dianggap rendah. Hal ini terjadi karena perusahaan tidak terdorong untuk melakukan pengungkapan secara mendalam karena pengungkapan pelaporan keberlanjutan masih bersifat sukarela. Faktor lain yang menimbulkan rendahnya tingkat pengungkapan laporan keberlanjutan yaitu kurangnya kesadaran perusahaan, perusahaan tidak memiliki komitmen untuk bersikap transparan, dan pembuatan laporan keberlanjutan yang dianggap membutuhkan waktu cukup lama serta adanya biaya tambahan (Ayu et al., 2024).

Kegiatan operasional sektor perbankan sekilas, tampak memiliki dampak lingkungan yang rendah dibandingkan sektor-sektor seperti pertambangan, real estate, atau manufaktur. Namun pada kenyataannya, sektor perbankan merupakan penyumbang dana terbesar bagi aktivitas industrialisasi dan eksploitasi melalui pembiayaan yang disalurkan. Dalam konteks inilah, sektor perbankan memiliki posisi yang sangat strategis dan tidak dapat dipandang sebelah mata. Meskipun perbankan bukanlah sektor yang secara langsung menimbulkan kerusakan lingkungan, namun perannya sebagai penyedia dana menjadikannya aktor penting dalam mendorong arah pembangunan yang berkelanjutan. Melalui fungsi intermediasi keuangan, sektor perbankan memiliki pengaruh besar terhadap aktivitas ekonomi lainnya karena mampu menentukan kepada siapa dan untuk apa dana disalurkan. Dengan demikian, bank memiliki kekuatan untuk mendukung kegiatan usaha yang memperhatikan aspek lingkungan, sosial, dan tata kelola (ESG), sekaligus mendorong terciptanya nilai jangka panjang bagi seluruh pemangku kepentingan.

Namun pada kenyataannya, kegiatan operasional sektor perbankan tidak terlepas dari kontribusi terhadap industrialisasi dan eksploitasi yang berdampak pada lingkungan, melalui pemberian pinjaman yang mereka salurkan. Hal ini diperkuat dengan berdasarkan evaluasi Transformasi untuk Keadilan (TuK) bersama *Trisakti Sustainability Center* terdapat fenomena dimana mereka melakukan evaluasi keuangan berkelanjutan terhadap 37 bank menemukan bahwa lingkungan merupakan aspek yang paling rendah diungkapkan berdasarkan pedoman POJK 51/2017. Rendahnya pengungkapan ini menunjukkan dua hal. Pertama, ketidaktahuan bank karena pengetahuan dan wawasan terhadap lingkungan rendah. Kedua, bank memang tidak menjalankan aspek lingkungan. Pada bank KBMI (Kelompok Bank Berdasarkan Modal Inti) III dan IV pengungkapan paling tinggi yaitu aspek sosial di mana setiap tahunnya meningkat. Dari setiap kategori bank pengungkapan aspek lingkungan menjadi yang terendah, meskipun setiap tahunnya telah menunjukkan adanya kenaikan. Pemberian aspek lingkungan, ternyata sangat sedikit dibandingkan dengan keseluruhan yang diklaim Bank, padahal masalah lingkungan dan sosial di Indonesia sangatlah besar dan beragam.

Kepala Kampanye dan Pendidikan Publik TuK Indonesia, Linda Rosalina menyampaikan, secara prosedural perbankan telah memenuhi kewajibannya sebagaimana diatur dalam POJK 51/2017 seperti disusunnya laporan keberlanjutan. Namun secara kualitas pengungkapannya masih buruk, sebab bank gagal mengungkapkan fakta-fakta materialitas ke dalam laporan keberlanjutannya. Selain itu Linda Rosalina juga menyebutkan bahwa selama ini, kelemahan praktik keuangan berkelanjutan salah satunya terletak pada kesadaran dan ketidakpahaman

proses bisnis sektoral oleh Perbankan. Peningkatan kapasitas dalam membangun kesadaran dan pemahaman bahwa keberlanjutan bukanlah sebuah biaya menjadi hal yang dibutuhkan.

Mantan Menteri Lingkungan Hidup, periode 1999-2001, Sonny Keraf menjelaskan, belum efektifnya implementasi keuangan berkelanjutan dikarenakan tiga hal. Pertama, orientasi Negara masih pada ekonomi pertumbuhan yang tercermin di dalam keputusan pemberian pinjaman bank yang mengutamakan keuntungan dibandingkan kinerja *environmental, social, and governance* (ESG). Kedua, tidak ada kekuatan yang memaksa soal perhatian perbankan dan Lembaga Jasa Keuangan (LJK) terhadap ESG. Ketiga, penegakan hukum lingkungan yang tidak efektif. Atas situasi tersebut, Keraf menawarkan ke depan adalah seluruh komponen masyarakat mengambil langkah untuk memperkuat peran OJK dalam mengawal seluruh implementasi kebijakan keuangan berkelanjutan.

Terdapat beberapa faktor yang memengaruhi pengungkapan laporan keberlanjutan, antara lain inovasi teknologi, struktur modal, dan struktur kepemilikan. Faktor pertama, yaitu inovasi teknologi. Inovasi teknologi mencakup kegiatan penelitian, pengembangan, dan/atau perekayasaan yang baru, atau cara baru dalam menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah ada ke dalam produk atau proses produksi. Inovasi berperan penting dalam mendorong perusahaan untuk meningkatkan profitabilitas sekaligus berkontribusi terhadap lingkungan dan sosial. Dalam kerangka teori pemangku kepentingan (*stakeholder theory*), inovasi teknologi tidak hanya berdampak positif terhadap efisiensi operasional dan profitabilitas, tetapi juga menjadi pendorong bagi perusahaan untuk

mendukung pertumbuhan ekonomi dan menciptakan lapangan kerja yang lebih berkelanjutan. Prastyawan & Astuti (2023) menunjukkan bahwa inovasi teknologi berpengaruh positif terhadap pengungkapan laporan keberlanjutan.

Faktor kedua adalah Struktur modal. Struktur modal merupakan perbandingan antara pembiayaan yang berasal dari utang dengan pembiayaan yang berasal dari modal sendiri. Perusahaan dengan tingkat pertumbuhan tinggi memerlukan tambahan modal eksternal untuk mendukung pengembangan bisnis yang kompleks. Struktur modal mencerminkan strategi pembiayaan perusahaan dan memengaruhi bagaimana perusahaan menyampaikan tanggung jawabnya kepada pemangku kepentingan melalui laporan, baik keuangan maupun non-keuangan. Dalam kerangka teori pemangku kepentingan, manajemen diharapkan dapat berkomunikasi secara terbuka tentang aktivitas perusahaan. Ismi & Hendrani (2024) menunjukkan bahwa struktur modal berpengaruh positif terhadap pengungkapan laporan keberlanjutan. Namun, hasil ini berbeda dengan temuan Wulandari & Fauziati (2024) yang menyatakan bahwa struktur modal tidak berpengaruh terhadap Pengungkapan Laporan Keberlanjutan.

Faktor terakhir adalah struktur kepemilikan. Struktur kepemilikan mencerminkan pemisahan antara pemilik perusahaan dan manajemen. Pemilik atau pemegang saham berperan sebagai penyedia modal, sementara manajemen bertanggung jawab dalam pengambilan keputusan dan pengelolaan perusahaan. Kholmi & Susadi (2021) menunjukkan bahwa struktur kepemilikan yang meliputi kepemilikan manajerial, institusional, dan asing berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan sustainability report. Namun, penelitian lain oleh Dwiyani and

Muslim (2022) menyimpulkan bahwa kepemilikan institusional dan asing tidak berpengaruh terhadap pengungkapan tersebut. Begitu pula dengan penelitian Sandri et al (2021) yang menyatakan bahwa kepemilikan asing tidak memiliki pengaruh terhadap pengungkapan laporan keberlanjutan.

Berdasarkan paparan diatas dan juga didukung dengan perbedaan hasil penelitian terdahulu terkait variabel yang mempengaruhi pengungkapan laporan keberlanjutan, maka peneliti mengambil judul penelitian “**Pengaruh Inovasi Teknologi, Struktur Modal, dan Struktur Kepemilikan terhadap Pengungkapan Laporan Keberlanjutan Pada Perusahaan Perbankan Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2022-2024**”.

1.2 Perumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang penelitian diatas, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Apakah Inovasi Teknologi berpengaruh terhadap pengungkapan laporan keberlanjutan pada perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2022-2024?
2. Apakah Struktur Modal berpengaruh terhadap pengungkapan laporan keberlanjutan pada perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2022-2024?
3. Apakah kepemilikan institusional berpengaruh terhadap pengungkapan laporan keberlanjutan pada perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2022-2024?

4. Apakah kepemilikan asing berpengaruh terhadap pengungkapan laporan keberlanjutan pada perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2022-2024?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang penelitian dan rumusan masalah penelitian diatas, dapat diketahui tujuan penelitian yaitu sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh Inovasi teknologi terhadap Pengungkapan Laporan Keberlanjutan pada perusahaan Perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2022-2024.
2. Untuk mengetahui pengaruh Struktur modal terhadap Pengungkapan Laporan Keberlanjutan pada perusahaan Perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2022-2024.
3. Untuk mengetahui pengaruh kepemilikan institusional terhadap Pengungkapan Laporan Keberlanjutan pada perusahaan Perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2022-2024.
4. Untuk mengetahui pengaruh kepemilikan asing terhadap Pengungkapan Laporan Keberlanjutan pada perusahaan Perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2022-2024.

1.4 Manfaat penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian diatas, manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat khususnya bagi pengembangan ilmu pengatahan sebagai sumber bacaan atau referensi yang dapat memberikan informasi teoritis dan empiris pada pihak-pihak yang akan melakukan penelitian lebih lanjut mengenai permasalahan ini serta dapat menambah sumber pustaka yang telah ada.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi perusahaan, penelitian ini diharapkan dapat membantu untuk meningkatkan pelaporan lingkungan serta meningkatkan transparansi di dalam pengungkapannya.
- b. Bagi investor, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam mengambil keputusan berinvestasi pada perusahaan yang peduli terhadap lingkungan sekitar.
- c. Bagi regulator dengan adanya penelitian ini, para pembuat kebijakan diharapkan dapat menetapkan standar minimal mengenai pengungkapan lingkungan dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas pengungkapan lingkungan.